



Strategi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dinas Sosial Kota Palu dalam Memotivasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

 Yayan¹, Lukman S. Tahir² dan Jusmiati³

Institut Agama Islam Negeri Palu, Indonesia^{1,2&3}

 Jusmiati@iainpalu.ac.id*

Article Information:

Received April 17, 2020

Revised June 4, 2020

Accepted June 16, 2020

Keywords: Lembag Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Motivasi, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Abstract

This study aims to describe in full and in depth the social reality and various phenomena that occur in the society which is the subject of research so that the characteristics, characters, traits, and models of these phenomena are described. The main issues in this study are 1. How is the welfare of scavengers and beggars in Palu City 2. What factors affect the welfare, psychological and financial of scavengers and beggars. 3 What is the strategy of the Palu City Social Service Family Welfare Consultation Institute in motivating the welfare of scavengers and beggars. This research is classified as qualitative with the research approach used is a normative and sociological approach, namely environmental interactions that are in accordance with social units, individuals, groups, institutions, or communities. The data source of this research is the people of scavengers and beggars. Furthermore, the data collection methods used were observation, interviews, and documentation. Then the data processing and analysis techniques were carried out through three stages, namely: data reduction, data presentation and drawing conclusions. This study was carried out by checking the validity of the data with triangulation techniques. In an effort to improve people's welfare, these efforts cannot be separated from the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD). Based on this basis, the Palu City Social Service has adopted various policies to improve the welfare of the community, especially scavengers and beggars. In the study, it was found that the welfare of scavengers and beggars in Palu City by the Family Welfare Consultation Institute (LK3) is an increase in human and economic resources, by providing assistance in the form of rehabilitation and knowledge development to provide abilities to beggars and scavengers in Palu City. There are many factors behind the emergence of scavengers and beggars in people's lives. Based on the author's observations, the factors in the emergence of beggars and scavengers can be caused by 1. Poverty problems (Financial). 2 Educational problems. 3 Work skills problems. 4 Psychic Problems.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang terus melakukan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di negaranya yang sesuai dengan pasal 33 UUD 1945, yang diantaranya adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Pembangunan yang dilakukan tidak hanya menyangkut peningkatan dan pertumbuhan Ekonomi tetapi pembangunan ditunjukkan untuk kesejahteraan masyarakat. Khususnya perhatian lebih pada masyarakat yang kurang beruntung agak tidak selalu dikesampingkan termasuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

PMKS adalah keluarga atau kelompok yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan jasmani dan rohani). dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (kebutuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau lebih dikenal dengan pemulung dan pengemis sering terlihat di beberapa kota besar.

Dengan munculnya penyandang masalah kesejahteraan sosial di suatu kota, akan memberi peluang adanya gangguan keamanan yang akan berdampak pula pada sektor pembangunan. Sering kali kita jumpai dengan keadaan yang keberadaan PMKS tersebut seperti di lampu merah, emperan toko bahkan perumahan-perumahan. Faktor lain penyebab muncul dan bertambahnya penyandang masalah kesejahteraan sosial yakni menyempitnya lahan pertanian di desa karena digunakan untuk pembangunan pemukiman dan perusahaan atau pabrik. Keadaan ini mendorong penduduk desa untuk pindah ke daerah dengan maksud untuk merubah nasib, tapi sayangnya mereka tidak membekali diri dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai. Sehingga keadaan ini akan menambah tenaga yang tidak produktif di kota. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka bekerja apa saja asalkan mendapatkan uang termasuk meminta-minta (mengemis).

Program Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Lk3) diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat terutama bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS, pemberdayaan warga miskin dan PMKS, peningkatan bantuan sosial, peningkatan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial dan lain-lain.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh LK3 dalam mendukung Program PMKS antara lain, operasional panti khusus, penyantunan bagi lanjut usia potensial luar panti, Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama,(KUBE),Pembinaan dan pengembangan kesetiakawanan social serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, Peningkatan petugas pelaksana pengelolaan jaminan kesejahteraan sosial, Pemberdayaan dan pengembangan Karang taruna, asilitasi terhadap Organisasi Sosial, Pemberdayaan dan pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat

Kegiatan LK3 yang lain adalah memotivasi untuk memberikan semangat dan pembelajaran yang dapat mengarah pada perubahan pola pikir untuk meningkatkan keterampilan atau potensi, kekuatan, minat, bakat, keahlian atau kualitas diri yang cakap, tepat, sehingga menjadi trampil berkarya dan bekerja, tetapi belum maksimal sesuai yang diharapkan akibatnya jumlah PMKS di Kota Palu semakin bertambah. Berangkat dari masalah tersebut yang di kemukakan pada latar belakang maka, peneliti ingin mengetahui Strategi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Dinas Sosial Kota Palu Dalam Memotivasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field resarch) yang dilakukan di Dinas Sosial Kota Palu. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subyek penelitian sehingga tergambaran ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena tersebut

Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian sebagai objek penelitian adalah Dinas Sosial Kota Palu Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat. Penulis memilih lokasi ini berdasarkan pada pertimbangan untuk mengetahui strategi dari dinas sosial kota palu dalam memotivasi keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Kehadiran peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, hal ini seperti yang

dikatakan Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama

Data dan Sumber Data

Data primer

Data primer merupakan data lapangan (field research) yang diperoleh dari beberapa narasumber atau informan yang diambil setelah dilakukan observasi dan wawancara terlebih dahulu di lokasi penelitian. Yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang mengetahui dan menguasai permasalahan.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh baik dari perpustakaan, lembaga terkait, maupun dari sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini seperti teori-teori yang digunakan, serta aturan perundang-undangan dan para ahli terkait dengan masalah yang dibahas.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Observasi

Observasi juga merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung terhadap gejala-gejala, subjek atau objek yang diselidiki di lokasi penelitian demi memperoleh data lapangan yang akurat, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi khusus yang sengaja

Teknik Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu memberikan pertanyaan sesuai dengan keinginan peneliti namun tetap berpedoman ketentuan yang menjadi pengontrol relevansi isi wawancara. Sedangkan pelaksanaan menggunakan pedoman wawancara yaitu garis besar materi wawancara yang dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti.

Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termaksud juga tentang buku-buku tentang pendapat, teori, dalil dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹² Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh data yang langsung dari obyek yang diteliti seperti data dalam bentuk dokumen dan publikasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data, dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis yang dikemukakan Miles dan Huberman mencakup tiga kegiatan yang bersamaan antara lain: Reduksi data, Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya. Penyajian data, Setelah mereduksi data, kemudian penyajian data agar data tersebut terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan lebih mudah. Verifikasi data, yaitu adanya suatu pengambilan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti terhadap data tersebut.

Pengecekan Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil penelitian, peneliti dituntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian. Pengamatan yang cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data

itu.16 Triangulasi terbagi menjadi tiga yaitu triangulasi dengan sumber, triangulasi dengan metode dan triangulasi dengan teori. Tetapi peneliti dalam hal ini menggunakan teknik triangulasi dengan sumber.

PEMBAHASAN

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mendapat berbagai informasi dan keterangan dalam hal adanya strategi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga terhadap masalah pengemis dan pemulung di kota palu, peneliti menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang dijadikan agenda pembahasan di antaranya 1. Gambaran umum dinas sosial kota palu, 2. Gambaran umum lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, strategi, fungsi, visi misi, 3. Strategi yang digunakan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) dalam memotivasi pengemis dan pemulung yang ada di kota palu untuk sejahtera secara psikis dan financial 4. Faktor-faktor penyebab terjadinya masalah kesejahteraan terhadap pemulung dan pengemis di kota palu.

Dinas Sosial Kota Palu merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Dinas Sosial Kota Palu memiliki tugas pokok yakni melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial. Berdasarkan aturan normatif bahwa kedudukan Dinas Sosial Kota Palu dibentuk berdasarkan peraturan wali Kota Nomor 12 tahun 2017 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial dan mempunyai tugas pokok untuk membantu Kepala Daerah serta tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat Daerah.

Permensos No 16 tahun 2003 menjelaskan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut (LK3) adalah unit pelayanan sosial terpadu yang melaksanakan penanganan masalah psikososial keluarga untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Sebagai unit pelayanan sosial terpadu, LK3 juga dapat disebut sebagai lembaga kesejahteraan sosial. Unit pelayanan sosial terpadu merupakan seperangkat pelayanan yang komprehensif dan terkoordinasi untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang bermasalah psikososial.

Strategi LK3 dalam membantu menangani masalah sosial psikologis keluarga. Pengembangan LK3 ini mencakup sarana prasarana, sumber daya manusia dan komitmen pemerintah pusat (Kementerian Sosial) maupun pemerintah daerah dalam menunjang keberlanjutan program ini. Pengembangan LK3 kabupaten/kota maupun LK3 berbasis masyarakat diharapkan dapat menjadi media dalam penanganan masalah sosial psikologis keluarga yang semakin meningkat baik kualitas maupun kompleksitasnya. Berikut merupakan tabel dari data jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial pengemis dan pemulung di Dinas sosial Kota Palu:

Tabel 1. Data Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Palu

NO	Jenis PMKS	Jumlah PMKS	Penerima Bantuan	Keterangan
1.	Pengemis	102		
2.	Pemulung	267		

Profil Subjek

Subjek penelitian adalah orang yang dijadikan sebagai sumber data atau sumber informasi adapun subjek dari penelitian ini berjumlah 5 orang diantaranya sebagaiberikut:

Tabel. 2 Profil Subjek

. Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan
Sarfan S.Fil.I	Laki-Laki	37	Seksi Bagian Penanggulangan Fakir Miskin
Arwadi, SE	Laki-Laki	55	Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial
Fatmawati, SE.,MM	Perempuan	37	Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial
Ramlah	Perempuan	46	Pemulung
Rosmiati	Perempuan	68	Pengemis

Subjek yang pertama adalah seorang konselor sekaligus kepala seksi yang menangani bagian penanggulangan fakir miskin di dinas sosial kota palu, subjek yang kedua adalah konselor lembaga konsultasi keluarga dinas sosial kota palu, subjek yang ketiga konselor lembaga konsultasi keluarga dinas kota palu, subjek ke empat adalah pemulung yang di tangani dinas sosial kota palu dan subjek ke empat merupakan pengemis yang di tangani sementara di tangani oleh dinas sosial kota palu.

Kesejahteraan pemulung dan pengemis di Kota Palu

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa kebijakan yang telah diprogramkan oleh Dinas Sosial Kota Palu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, upaya-upaya tersebut tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Berdasarkan dengan landasan tersebut, maka Dinas Sosial Kota Palu pengambil berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menyelesaikan persoalan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Maka ditetapkan berbagai program sebagai berikut:

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, (Pengemis)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (fakir miskin, karena fakir miskin merupakan tanggung jawab Negara sebagaimana temaktub dalam Undang-Undang pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Persoalan yang terbesar yang dihadapi bangsa ini adalah perosalan kemiskinan yang melahirkan PMKS yang lainnya.Menjadi sasaran dalam program ini adalah Keluarga sangat miskin, keluarga miskin, wanita rawan sosial ekonomi, keluarga berumah tidak layak huni. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak W.1 dalam wawancara:

“Bahwa kemiskinan yang terjadi dalam keluarga, yang membuat bapak/ibu dalam rumah tangga tersebut sibuk mencari nafkah, sehingga kadang anak- anak mereka tidak diperhatikan terutama persoalan pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhannya yang pada akhirnya membuatnya terlantar, tidak mendapatkan pendidikan yang kemudian membuatnya bodoh dan tidak memiliki kreatifitas ”

Melihat kondisi riil tersebut dinas sosial Kota Palu melakukan berbagai upaya untuk keluar dari lingkaran tersebut melalui Peningkatan kemampuan (Capacity Building). Petugas dan Pendamping Sosial pemberdayaan fakir miskin dan PMKS lainnya. Para Psiksos akan mendampingi masyarakat yang mengalami persoalan penyandang masalah kesejahteraan sosial. dengan memberkan pelatihan keterampilan berusaha keluarga sangat miskin yang tidak

memiliki modal untuk melakukan usaha sehingga kedepannya mereka bisa mandiri, pembinaan manajemen usaha bagi keluarga miskin yang memiliki usaha akan tetapi belum bisa berkembang secara maksimal sehingga harus mendapatkan bantuan dan dukungan untuk menjalankan usahanya tersebut, disamping itu pengembangan potensi bagi keluarga miskin sangat penting mengingat bahwa untuk melakukan usaha harus memiliki kompetensi atau pengetahuan dalam bidang tersebut. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga sangat miskin, pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak W.2 dalam wawancara

"Pemerdayaan masyarakat yang mengalami PMKS perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk mendorong kemandirian dan produktifitas masyarakat dalam mengembangkan potensinya, sebagai contoh penyandang cacat dari keluarga yang tidak mampu setelah selesai melakukan pelatihan itu diberikan paket untuk mengembangkan usaha"

Dengan usaha-usaha yang telah dilakukan maka diharapkan agar meningkatkan kualitas sumber daya pendampingan sosial dan tenaga kerja sosial kecamatan sebagai pilar utama dalam percepatan pelayanan kesejahteraan sosial. Terciptanya kepercayaan diri, kemandirian individu dan keluarga serta menciptakan keterampilan praktis sebagai salah satu upaya menambah penghasilan keluarga melalui UEP. Terbentuknya kelompok usaha bersama (KUBE) bagi keluarga miskin yang memiliki usaha yang sama, serta memiliki pemahaman manajemen usaha bagi keluargamiskin melakukan pengembangan kelompok usaha bersama yang berorientasi kepada pemasaran produk sehingga dapat dijadikan sebagai salah penghasilan pokok untuk mendukung peningkatan kesejahteraan rumah tangga melalui pendekatan pengembangan kelompok melalui pengembangan usaha dan bantuan langsung pemberdayaan sosial (BLPS).

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial merupakan hal yang sangat urgen dalam pemulihan sosial setelah penulis melakukan observasi penulis mendapatkan dimana orang yang cacat, lansia tidak bisa lagi berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhannya. dimana pemberian pelayanan kepada masyarakat yang mengalami ketidak berfungsi sosial seperti penyandang cacat, lanjut usia akan mewujudkan keberdayaan individu dalam melangsungkan kehidupannya hal ini juga telah di amanahkan dalam undangundang nomor 11 tahun 2009 pasal 7 yang menyatakan Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.⁶Pelayanan rehabilitasi sosial sangat membantu masyarakat yang mengalami persoalan penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk memulai hidup normal, untuk mendukung hal tersebut Dinas Sosial Kota Palu melakukan pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lanjut usia, pelayanan dan perlindungan sosial dan hukumbagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak. Pelaksanaan KIE Konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) program konseling dan kampanye sosial akan memberikan informasi kepada masyarakat bagi mereka yang ingin mengetahui tentang persoalan sosial. Disamping distribusi informasi tersebut peningkatan kualitas anak jalanan juga dilakukan berupa Pelatihan Keterampilan dan praktek kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal serta korban tindak kekerasan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak W.3 dalam wawancara :

"Anak jalan yang kami temukan di perapatan lampu merah itu diberikan pendidikan dan pelatihan bekerjasama dengan SMK"

Melalui pembinaan tersebut akan melahirkan anak-anak yang produktif serta siap kerja, dan yang terpenting juga adalah pemberdayaan sosial keluarga anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pemulung. Pelayanan psikososial bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Trauma Centre termasuk bagi korban bencana. Pembentukan Pusat Informasi penyandang cacat dan Trauma Centre yang ditunjang dengan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Penanganan Masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.

Strategi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dinas sosial kota palu dalam motivasi Pemulung dan Pengemis untuk meningkatkan kesejahteraan Psikis dan Financial. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah peningkatan sumber daya manusia serta ekonomi, dengan cara memberikan bantuan berupa Rehabilitasi dan Pengembangan pengetahuan guna memberikan kemampuan kepada pengemis dan pemulung di kota palu. Sebagai hasil wawancara penulis dengan W.1 selaku Seksi Bagian Penanggulangan Fakir Miskin bahwa:

“Untuk penanganannya, kami melakukan rehabilitasi dan membuatkan mereka kelompok-kelompok sesuai apa yang mereka bisa, agar mereka tidak lagi kembali jadi pengemis dan pemulung, tapi tidak terlepas dari bantuan-bantuan dari pemerintah kota palu”

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh W.2 selaku Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial

“Kegiatan pelatihan kerja, yang telah disesuaikan dengan bakat mereka dan keahlian, boleh di coba semua, kalau tidak bisa, di cari lagi yang bisa, misalnya si A mau bengkel, tapi tidak paham dengan mekanikal, kemudian kami ajarkan cara-caranya, sehabis dia coba tapi tidak cocok, maka dia pilih lagi apa yang cocok”

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut LK3 adalah Unit pelayanan sosial terpadu yang melaksanakan penanganan masalah psikososial keluarga untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Strategi dari Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Dinas Sosial Kota Palu Dalam Memotivasi Kesejahteraan Pemulung dan Pengemis Strategi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dalam kesejahteraan pengemis dan pemulung di kota palu sudah berkontribusi sebagaimana mestinya seperti memberikan jaminan sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial.

Jaminan sosial

Merupakan bentuk pengurangan risiko melalui pemberian tunjangan pendapatan (income support) dan/atau penanggungan biaya ketika sakit, kecelakaan saat bekerja, kelahiran, usia lanjut, serta kematian. ILO menggambarkan jaminan sosial sebagai sebuah mekanisme penggabungan risiko finansial. Jaminan sosial pada umumnya menggunakan prinsip asuransi sosial, yaitu didasarkan pada mekanisme risk sharing dalam suatu kelompok penduduk yang memiliki tingkat risiko yang heterogen, dimana penduduk wajib menjadi peserta dan berkontribusi dengan membayar premi. Dengan kata lain, penanganan risiko dihadapi secara gotong royong oleh para pesertanya melalui pengelolaan dana pertanggungan yang dikumpulkan dari kontribusi premi. Jaminan sosial secara umum mensyaratkan bahwa para peserta memiliki sumber penghasilan yang relatif tetap dan sebagian dapat disisihkan untuk membayar premi. Hak dari peserta atas manfaat dari program jaminan sosial dijamin oleh catatan kontribusinya. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh W.1 selaku Seksi Bagian enangulangan Fakir Miskin bahwa :

“Kami juga memberikan KIS (Kartu Indonesia Sehat) Kepada masyarakat yang kurang mampu, guna menjamin kesehatannya

Hal sama juga di ungkapkan oleh W.4 dalam wawancara:

“KIS BPJS alhamdulillah ada dari pemerintah”

Perlindungan Sosial

Program perlindungan sosial di Indonesia memegang peran penting dalam upaya

pengentasan kemiskinan serta pembangunan ekonomi. Diperlukan cara pandang yang berbeda terhadap sistem perlindungan sosial di Indonesia. Selama ini, perlindungan sosial dipandang sebagai instrumen perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan. Masyarakat kurang mampu dan rentan juga harus diberi kesempatan dalam berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang setara di Indonesia.

Berdasarkan dengan landasan tersebut, maka Dinas Sosial Kota Palu pengambil berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menyelesaikan persoalan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Maka ditetapkan berbagai program sebagai berikut:

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, (Pengemis)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (fakir miskin, karena fakir miskin merupakan tanggung jawab Negara sebagaimana temaktub dalam Undang-Undang pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara.³ Persoalan yang terbesar yang dihadapi bangsa ini adalah perosalan kemiskinan yang melahirkan PMKS yang lainnya. Menjadi sasaran dalam program ini adalah Keluarga sangat miskin, keluarga miskin, wanita rawan sosial ekonomi, keluarga berumah tidak layak huni. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak W.1 dalam wawancara:

“Bahwa kemiskinan yang terjadi dalam keluarga, yang membuat bapak/ibu dalam rumah tangga tersebut sibuk mencari nafkah, sehingga kadang anak-anak mereka tidak diperhatikan terutama persoalan pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhannya yang pada akhirnya membuat anaknya terlantar, tidak mendapatkan pendidikan yang kemudian membuatnya bodoh dan tidak memiliki kreatifitas ”

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh W.1 selaku Seksi Bagian Penanggulangan Fakir Miskin bahwa:

“Kami juga memberikan mereka PKH, sebagai program keluarga harapan yang di peruntukan kepada masyarakat miskin namun sifatnya bersyarat.

Hal sama juga di ungkapkan oleh W.4 dalam wawancara:

“Ada, PKH, Sampai sekarang tidak ada terkendala, lancar-lancar saja, ”.

Program keluarga harapan pada dasarnya merupakan suatu bentuk jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah guna memastikan bahwa rakyat miskin dan tidak mampu dapat mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya dan masih dapat terpenuhi kebutuhan dasar minimal hidupnya.

Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial merupakan hal yang sangat urgen dalam pemulihan sosial setelah penulis melakukan observasi penulis mendapatkan dimana orang yang cacat, lansia tidak bisa lagi berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai Hasil wawancara yang diungkapkan W.2 selaku Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial

“Ada beberapa pengemis yang kami temukan perepatan lampu merah, di taman gelora olahraga dan pusat pembelanjaan yang di kota palu, kami berikan pendidikan dan pelatihan di sesuaikan dengan keadaan fisiknya”

Pelayanan rehabilitasi sosial sangat membantu pengemis yang mengalami persoalan penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk memulai hidup normal, untuk mendukung hal tersebut Dinas Sosial Kota Palu melakukan pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lanjut usia. Sebagai hasil wawancara penulis dengan W.1 selaku Seksi Bagian Penanggulangan Fakir Miskin bahwa:

“Untuk penanganannya, kami melakukan rehabilitasi dan membuatkan mereka kelompok-kelompok sesuai apa yang mereka bisa, agar mereka tidak lagi kembali jadi pengemis dan pemulung, tapi tidak terlepas dari bantuan-bantuan dari pemerintah

kota palu”

Melalui rehabilitasi tersebut akan mengurangi PMKS di kota palu khususnya pengemis dan pemulung.

Pemberdayaan Sosial

Pelayanan dan perlindungan sosial Pelaksanaan KIE Konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) program konseling dan kampanye sosial akan memberikan informasi kepada masyarakat bagi mereka yang ingin mengetahui tentang persoalan sosial. Disamping distribusi informasi tersebut peningkatan kualitas PMKS juga dilakukan berupa Pelatihan Keterampilan dan praktek kerja bagi PMKS terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal serta korban tindak kekerasan. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh W.1 selaku Seksi Bagian Penanggulangan Fakir Miskin bahwa:

“Untuk Pengemis dan pemulung terkadang kami gunakan strategi Penjakauan dengan melibatkan polisi pamong praja untuk menjangring seluruh para pengemis dan pemulung yang berkeliaran yang paling banyak di lampu merah dan di bagian taman Gor. Kemudian sehabis dari mereka di tangkap, kami akan melakukan pendataan terhadap para pengemis dan pemulung itu, dan dimasukan ketempat rehabilitasi. tempat rehabilitasi kami telah membentuk tim-tim pendamping yang akan mendampingi mereka dan memperbaiki kehidupan mereka”.

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh W.2 selaku Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial

“Untuk penaganannya semua yang telah terjaring dalam operasi entah itu pengemis, gelandangan, pemulung dan lain-lain, kami masukan mereka di panti rehabilitasi, di panti itulah mereka di ajari dan dibina.”

Melalui pembinaan tersebut akan melahirkan masyarakat yang produktif serta siap kerja, dan yang terpenting juga adalah pemberdayaan sosial keluarga anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pemulung. Pelayanan psikososial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Trauma Centre termasuk bagi korban bencana. Pembentukan Pusat Informasi penyandang cacat dan Trauma Centre yang ditunjang dengan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Penanganan Masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat.

Faktor-faktor penyebab terjadinya masalah kesejahteraan Pemulung dan Pengemis kota Palu

Banyak faktor yang melatar belakangi munculnya pemulung dan pengemis di kehidupan masyarakat. Berdasarkan pengamatan penulis, faktor-faktor munculnya pengemis dan pemulung dapat disebabkan karena :

Masalah kemiskinan (Financial)

Kemiskinan memberi kontribusi yang cukup besar dalam munculnya pemulung dan pengemis di kota palu. Seseorang atau kelompok tertentu hidup mengemis dan memulung dengan alasan mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga berbagai macam cara dapat dilakukan tanpa melihat efek dari perbuatannya tersebut.

Masalah pendidikan

Pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang berbuat hanya mengandalkan ego pribadi tanpa mempedulikan dampak yang akan diterima oleh orang lain. pengemis turun ke jalan dan meminta-minta dikarenakan tidak adanya kemampuan dalam menganalisa apakah

kegiatan tersebut telah sesuai dengan aturan-aturan selama ini yang dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Dari hasil wawancara penulis dengan W.1 selaku Seksi Bagian Penanggulangan Fakir Miskin bahwa :

“Kebanyakan mereka tidak memiliki pengetahuan dan SDM yang layak, yang dipikirkan hanya bagaimana bisa makan dan menenuhahi kebutuhannya.”

Masalah keterampilan kerja

Adanya pengemis dan pemulung di kota palu adalah kurangnya lapangan pekerjaan, Persaingan yang ketat ditambah dengan kurangnya pengalaman serta keterampilan para urban menjadikan mereka tidak terserap di lapangan kerja, sehingga akhirnya memutuskan untuk memulung dan meminta-minta di jalan. Sebagaimana yang di ungkapakan oleh W.4 seorang pemulung dalam wawancara :

“Saya memulung karena usia sudah tidak di terima kerja dimanapun, padahal saya tamatan SMA jurusan IPS, terus tambah-tambah biaya hidup sehari-hari”.

Hal yang sama juga di ungkapakan oleh W.5 seorang pengemis yang penulis wawancarai :

“Saya mengemis karena sudah tua, mau balik kekampung juga tidak ada biaya, saya aslinya dari sinjai”.

Masalah Psikis

Psikis merupakan salah satu penyebab adanya pengemis karena psikis selalu dikaitkan dengan proses tubuh rentan pada usia dan tidak mampu lagi melakukan sesuatu atau pekerjaan tertentu. Hal ini juga di ungkapkan oleh W.5 seorang pengemis yang penulis wawancarai:

“Kios, warung dan pekerjaan lainnya susah di temukan, karena usia sudah tidak lagi mampu”.

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh W.4 seorang pemulung dalam wawancara :

“Walaupun dimana mencari pekerjaan tetap saja tidak akan di terima karena usia saya yang sudah tidak muda lagi, mana ada pekerjaan yang bisa saya kerjakan”.

Dari hasil wawancara dapat penulis simpulkan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi adanya masalah kesejahteraan sosial pemulung dan pengemis di Dinas Sosial Kota Palu yaitu :

1. Masalah kemiskinan
2. Masalah pendidikan
3. Masalah keterampilan kerja (kemampuan)
4. Masalah Psikis.

KESIMPULAN

Dari Hasil Penelitian Yang Berjudul Strategi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Lk3) Dinas Sosial Kota Palu Dalam Memotivasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Kebijakan yang telah diprogramkan oleh Dinas Sosial Kota Palu dalam upaya peningkatkan kesejahteraan masyarakat, upaya-upaya tersebut tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Berdasarkan dengan landasan tersebut, maka Dinas Sosial Kota Palu pengambil berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Banyak faktor yang melatarbelakangi munculnya pemulung dan pengemis di kehidupan masyarakat di Kota Palu meliputi:

- a. Masalah kemiskinan (*Financial*)
- b. Masalah pendidikan
- c. Masalah keterampilan kerja
- d. Masalah Psikis

Strategi dari Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Dinas Sosial Kota Palu Dalam Memotivasi Kesejahteraan Pemulung dan Pengemis. Mengatasi masalah psikososial keluarga,

yaitu dengan melakukan tindakan deteksi dan antisipasi terhadap keluarga yang diindikasikan mengalami resiko dan ancaman masalah atau gangguan relasi di dalam keluarga. Memulihkan kondisi psikososial keluarga, dengan melakukan dukungan terhadap keluarga dalam menyelesaikan atau mengatasi masalah psikososial yang dihadapi keluarga. Memperkuat ketahanan keluarga yaitu dengan upaya meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya yang dimiliki baik ekonomi, pendidikan, akhlak/agama, relasi sosial anggota keluarga sehingga memiliki kekuatan mengatasi dan menyesuaikan diri dengan masalah-masalah yang dihadapi.

Referensi

- A. Heene & S. Desmidt, *Manageman Strategik Keorganisasian Publik* Jakarta: PT. Refika Abdurrahman Mulyono. Pendidikan Bagi Anak Yang Berkesulitan Belajar, Jakarta: Rineka Cipta 200, 25.
- Andi Resky Firadika, *Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 UUD Tahun 1945 Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Gowa*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Goa: Uin Alauddin Makassar 2017.
- Bejo Siswanto, *Manajemen Tenaga kerja*, Bandung : Sinar Baru, 1989, 243 .Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.
- Pedoman Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2009.
- Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta, *Definisi dan Kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial* Jakarta, 2007,1.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. PT Refika Aditama, 2005, 59.
- George Terry, *Prinsip – Prinsip Manajemen*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996, 131. Idianto Muin, *Sosiologi Kelompok Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Erlanga, 2013,84-86
- Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*, Jakarta: FEUI, 2003,1.
- J. Salusu, *Pengambilan Keputusan Stratejik*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006, 86.
- Lawrance Jauch dan William F. Glueck, *Managemen Strategis dan kebijakan Perusahaan*, Jakarta: Erlangga, Edisi ketiga, 1998, 128.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, 3. Matthew B.
- Milles, A. Michael Huberman, *Quantitatif Data Analisis*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi, *Analisis Data Kuantitatif*, Cet. I; Jakarta: UI-Pres, 1992, 16.
- Muhammad Syahid Fudholi Al-Hasyim, *Official sites of UNICEF Kajian Nomenklatur PMKS Pusdatin Departemen Sosial RI*, Yogyakarta: Erlangga 2014, 3.
- M. Syahid Fudholi Al-Hasyim, *Metode Pembinaan Agama Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Di Panti Sosial Bangun Daya I Kedoya Jakarta Barat*, Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2012.
- Moleong J. Lexy, *Penelitian kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008, 125
- Salusu. J, *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Non Profit*, Jakarta: Grasindo, 2006, 84.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008, 22. S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta : Rineke cipta, 2004, 181.
- Whinda Wikansari, *Implementasi Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Dalam Menangani Anak Terlantar Setelah Berlakunya UU RI No. 23 Tahun 2002*, Skripsi Fakultas Hukum Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

Yayan, Lukman S. Tahir dan Jusmiati

- Wiliam F. Glueck & Lawarance R. Jauch, Manageman Strategis dan Kebijakan Perusahaan, Edisi ketiga, Terjemahan Murad dan Hendry, Jakarta: Erlangga, 2000, 13.
- Wina Sanjaya, Jenis, Metode, dan Prosedur, Jakarta: Kencana, 2013, 47.
- Yatim Rianto, Metodologi Penelitian Pendidikan, Surabaya: SIC Surabaya, 1996, 77.